Kepulauan Riau

POLICY BRIEF

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN RESPONS TUMPAHAN LIMBAH MINYAK HITAM DI BINTAN:

"MEMBANGUN RESILIENSI EKOSISTEM LAUT"

Oleh: Riska Putri Sari

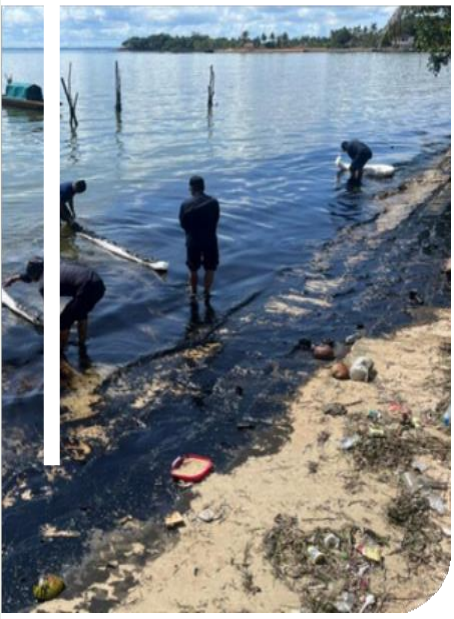

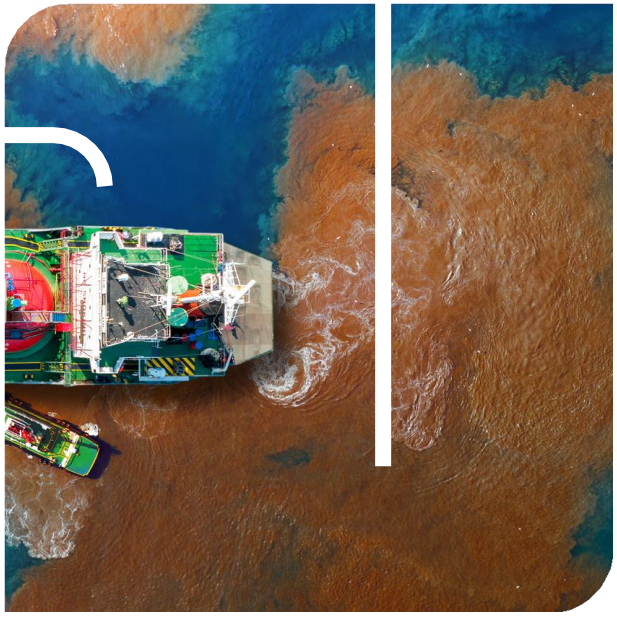

"Membangun solusi yang menghasilkan keuntungan bagi Masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan dalam penanganan tumpahan minyak di Bintan."

Bintan island

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tumpahan minyak di Bintan menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem laut di kawasan ini, berpotensi membahayakan kehidupan laut, termasuk flora dan fauna, dan membahayakan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk mata pencariannya. Dampak ekonomi dari bencana minyak hitam ini sangat parah, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat lokal. Selain itu, kesehatan manusia juga berisiko akibat konsumsi makanan laut yang terkontaminasi dari daerah tertular. Kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak hitam mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang, mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan memperlambat proses pemulihan alami. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang cepat dan tepat, termasuk tindakan pembersihan dan pencegahan untuk mengatasi tumpahan minyak ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Memperkuat sistem pemantauan dan penindakan terhadap para pencemar juga penting Edukasi dan keterlibatan masyarakat untuk menjaga kebersihan laut akan membantu melindungi ekosistem kawasan Bintan dan mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pencemaran limbah minyak hitam di perairan Bintan telah menjadi isu yang berulang dan kritis. Data sekunder menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, telah terjadi lebih dari sepuluh insiden tumpahan minyak hitam di kawasan ini. Hasil survei terhadap masyarakat pesisir mengungkapkan bahwa 70% penduduk mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran ini. Observasi langsung dan indepth interview dengan nelayan lokal mengindikasikan penurunan drastis dalam hasil tangkapan ikan, yang mencapai 40% dalam satu dekade terakhir. Fokus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan lokal menyoroti kurangnya koordinasi dan respons cepat dalam menangani tumpahan limbah minyak hitam. Analisis isi surat kabar lokal dan nasional menunjukkan liputan yang luas tentang dampak negatif pencemaran ini terhadap ekonomi dan lingkungan, di bawah ini merupakan gambar wilayah yang terdampak.

Gambar : Wilayah Terdampak Tumpahan minyak di Kabupaten Bintan

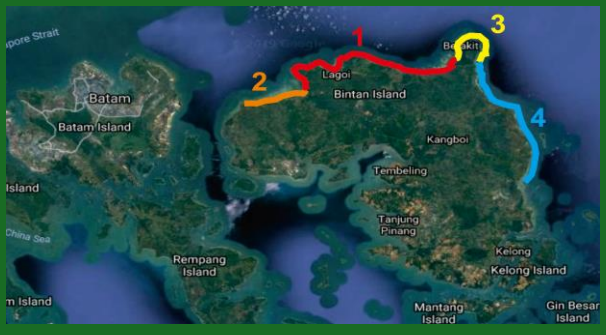

Keterangan:
Zona 1 Pantai Lagoi
Zona 2 Pantai Syakera
Zona 3 Pantai Berakit
Zona 4 Pantai Trikora

Sumber: (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan 2021*, n.d.).

Dampak dari tumpahan minyak hitam sangat luas dan merusak. Dari sisi lingkungan, tumpahan ini menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut. Terumbu karang, yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut, mengalami pemutihan dan kematian masal. Populasi ikan dan biota laut lainnya juga

menurun tajam, yang pada gilirannya mengganggu rantai makanan laut. Selain itu, hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyangga alami terhadap erosi pantai juga rusak, mengakibatkan kerentanan lebih tinggi terhadap bencana alam seperti banjir dan badai. Dari sisi ekonomi, pencemaran minyak hitam berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat Bintan. Sektor perikanan mengalami kerugian besar, dengan banyak nelayan yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Industri pariwisata, yang bergantung pada keindahan pantai dan kebersihan laut, juga terpukul keras. Banyak wisatawan membatalkan kunjungan mereka, menyebabkan penurunan pendapatan bagi bisnis lokal seperti hotel, restoran, dan penyedia layanan wisata. nMasyarakat pesisir juga menghadapi masalah kesehatan akibat kontak langsung dengan minyak yang tercemar. Kasus iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya meningkat, memaksa warga untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan medis.

Dalam policy brief ini, kami akan mengevaluasi kebijakan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap tumpahan limbah minyak hitam di Bintan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi dan dampak dari tumpahan minyak hitam, melindungi keanekaragaman hayati laut, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Bintan. Kami juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini guna mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

DESKRIPSI MASALAH

Kebijakan Eksisting dari pemerintahan daerah Kabupaten Bintan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi pencemaran limbah minyak. (Surati, n.d.) Pemkab Bintan mengatakan telah melayangkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk mengatasi limbah minyak hitam yang mencemari pantai dan laut Kabupaten Bintan. Kebijakan yang di berikan yaitu seperti menurunkan alat berat agar secara bersama-sama membersihkan limbah minyak hitam dan sampah-sampah limbah minyak hitam itu. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan setempak untuk mengatasi permasalah pencemaran minyak hitam pada pantai di kabupaten Bintan.

Tabel: Upaya Mitigasi Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Menanggulangi Tumpahan Minyak Hitam

Tanggal	Upaya mitigasi yang dilakukan
09 April 2010	Bupati Bintan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup RI melalui surat Nomor 660/BLH-Wastau/216a perihal Penanganan Pencemaran Pantai Trikora, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan
12 Desember 2011	Pemantauan ke lokasi perairan di kawasan wisata lagoi, perairan Tanjung Talok, Desa Teluk Sasah.
24 Januari 2012	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup Cq. Deputi V Bidang Penaatan Lingkungan perihal Pencemaran Perairan Pulau Bintan, nomor surat: 660/BLH/30

29 Januari 2013	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup Cq IV Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah perihal Pencemaran Perairan Bintan dan laporan mengenai pemantauan yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, nomor surat 660/BLH/Wastau/105
12 Februari 2013	Bupati Bintan menyurati Gubernur Kepulauan Riau melalui surat Nomor 660/BLH-Set/193 perihal Penanganan Pencemaran Sludge oil di Perairan Pulau Bintan, dan melaporkan kondisi pencemaran limbah minyak di perairan pantai bagian utara dan timur pulau Bintan
26 Mei 2014	Bupati Bintan menyurati Menteri Lingkungan Hidup Up.Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, nomor surat:660/BLH-Wastau/906, perihal Penangan Tumpahan Minyak Hitam di Kabupaten Bintan, dan melaporkan hasil rapat koordinasi
19 Januari 2015	Bupati Bintan menyurati Gubernur Kepulauan Riau perihal Penangan Tumpahan Minyak Hitam di Kabupaten Bintan, Nomor Surat 660/BLH/42.a, dan melaporkan koordinasi yang telah dilakukan bersama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau.
05 April 2016	Rapat Koordinasi Tumpahan Minyak di Kabupaten Bintan yang dihadiri oleh Kemenko Maritim RI, BAKAMLA RI, Dir.Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Dir.PPKPL-KLHK, Dir Sampah dan PLB3, Satpol Air Bintan, Lantamal IV Tanjungpinag, Dll
15 Februari 2016	Bupati Bintan menyurati KASAL RI perihal Penanganan Limbah Minyak Hitam (Sludge oil) di Kabupaten Bintan Nomor surat:660/BLH/81
02 Februari 2018	Bupati Bintan menyurati Bapak Presiden Republik Indonesia perihal Pencemaran Limbah Sludge oil pada kawasan pariwisata Lagoi Kabupaten Bintan dan melaporkan upaya upaya yang telah dilakukan dalam penanganan limbah minyak hitam tersebut.
14 Mei 2018	Gubernur Kepulauan Riau membentuk TIM DAERAH PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK DI LAUT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Oktober 2018	DLHK Provinsi Kepri bekerja sama dengan DLH Kabupaten Bintan dan masyarakat sekitar pantai Syakera telah melakukan pembersihan limbah minyak hitam yang tersebar di sepanjang pantai Syakera dengan memasukkan kedalam drum-drum dan mengangkutnya melalui transporter resmi ke tempat pengumpulan Limbah B3 di Batam
November 2018	Dilakukan juga pembagian drum-drum kosong sebagai wadah gumpalan limbah minyak sebanyak 100 drum yang dibagikan ke pengelola kawasan pantai wisata Lagoi.

Sumber: (*Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan 2021*, n.d.)

Namun, terlepas dari upaya-upaya tersebut, masalah pencemaran minyak hitam terus terjadi, yang menunjukkan kelemahan dalam implementasi dan efektivitas kebijakan. Secara kenyataannya masih banyak kelemahan. Kegiatan operasional di lapangan belum sepenuhnya berjalan karena mekanisme operasional belum dikembangkan. Koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi poin penting dalam pemantauan berkelanjutan terhadap upaya pencegahan tumpahan minyak lumpur di perairan Selat Malaka. Oleh karena itu, perlu dibangun pola koordinasi yang aktif dan terpusat.(Kurniawan, 2023).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pencemaran limbah minyak hitam terus terjadi di Kabupaten Bintan karena buruknya penerapan kebijakan pencegahan dan pembuangan yang ada. Isu strategis ini mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan perekonomian lokal yang bergantung pada pariwisata dan perikanan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, penegakan hukum, dan partisipasi aktif pemerintah daerah Bintan, industri terkait, dan masyarakat lokal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

INTI PERMASALAHAN

a. Implementasi kebijakan yang lemah: Kebijakan pencegahan dan respons tumpahan minyak hitam yang ada tidak diterapkan secara efektif, terutama karena kurangnya sumber daya, koordinasi, dan penegakan hukum.
b. Dampak parah terhadap lingkungan dan ekonomi: Tumpahan minyak hitam tidak hanya merusak ekosistem laut dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan pada sektor perikanan dan pariwisata, namun juga mengancam kesehatan masyarakat pesisir.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

a. Penguatan Penegakan Hukum dan Patroli Maritim : Memperkuat penegakan hukum terhadap daerah pembuangan limbah minyak ilegal dengan memperkuat kapasitas penegakan hukum dan melakukan patroli maritim yang lebih konsisten. Selain itu, pemerintah harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung patroli ini, termasuk kapal patroli yang dilengkapi dengan teknologi pendeteksi minyak bekas.
b. Memperkuat prosedur tanggap darurat: Mengembangkan dan memperbarui prosedur tanggap darurat terhadap tumpahan minyak hitam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelatihan dan simulasi rutin harus dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi tumpahan minyak. Serta Industri dan bisnis yang beroperasi di perairan harus memiliki rencana darurat yang jelas dan peralatan darurat yang sesuai.
c. Pendidikan dan kesadaran masyarakat: Melaksanakan program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran minyak hitam dan pentingnya menjaga lingkungan laut. Program ini harus melibatkan sekolah, komunitas, dan media massa. Masyarakat juga harus didorong untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat menyebabkan tumpahan minyak.
d. Kerjasama Stakeholder : Membentuk forum komunikasi dan koordinasi yang melibatkan pemerintah, industri, masyarakat dan LSM untuk bersama-sama membahas dan mengatasi masalah pencemaran minyak hitam. Forum ini harus bertemu secara berkala dan memiliki struktur yang jelas. Industri juga harus berkomitmen menerapkan praktik operasi ramah lingkungan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mengurangi risiko polusi. Partisipasi dalam forum multipihak juga penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
e. Pendanaan dan Insentif : Menyediakan pendanaan yang memadai untuk program pengendalian dan tanggap tumpahan minyak hitam. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dan praktik pengelolaan limbah yang baik. Mendorong donor dan organisasi internasional untuk memberikan dukungan finansial dan teknis terhadap upaya memerangi pencemaran minyak hitam di Bintan.

Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan penegakan hukum, penguatan prosedur tanggap darurat, pendidikan masyarakat, kerja sama antar Stakeholder, dan Pendanaan yang insentif Mengingat dampak buruknya terhadap ekosistem laut, perekonomian lokal, dan kesehatan masyarakat, pentingnya tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini tidak bisa dipungkiri. Seluruh pemangku kepentingan harus segera menerapkan langkah-langkah tersebut untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperkuat ketahanan ekosistem laut Bintan. Untuk memberikan efek jera terhadap pencemaran, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran mendapat sanksi yang sesuai. Menanggapi tumpahan minyak dengan cepat dan efisien memerlukan prosedur tanggap darurat yang lebih baik, termasuk pelatihan dan peralatan yang ses Edukasi masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif tumpahan minyak dan bagaimana dampak tersebut dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan pembersihan. Untuk memastikan sinergi dalam mengatasi masalah ini, kerja sama antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, dan organisasi lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat sangat penting untuk mendukung semua upaya ini, mulai dari penegakan hukum, pendidikan, hingga upaya perbaikan lingkungan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, ekosistem laut Bintan diharapkan dapat pulih dan terlindungi dari ancaman tumpahan minyak di masa depan, sekaligus menjaga perekonomian lokal dan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Tumpahan minyak di Bintan merupakan masalah serius yang mengancam ekosistem laut, perekonomian lokal, dan kesehatan masyarakat. Meskipun langkah-langkah perbaikan telah diambil, masalah ini tetap ada karena buruknya implementasi kebijakan, koordinasi, dan penegakan hukum. Dampak lingkungan antara lain rusaknya terumbu karang, menurunnya populasi ikan, dan rusaknya hutan bakau. Dampak ekonomi sangat terasa pada sektor perikanan dan pariwisata yang mengalami kerugian besar. Kesehatan masyarakat pesisir juga terancam oleh meningkatnya penyakit dermatitis dan pernafasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, usulan rekomendasi kebijakan antara lain penguatan penegakan hukum dan patroli maritim, penguatan prosedur tanggap darurat, edukasi dan kesadaran masyarakat, kerja sama antar stakeholder, serta peningkatan pendanaan dan insentif. Penerapan langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memulihkan ekosistem laut Bintan, melindunginya dari ancaman tumpahan minyak di masa depan, menjaga keberlanjutan ekonomi lokal, dan melindungi kesehatan masyarakat. Tindakan mendesak dan efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menjamin ketahanan ekosistem dan masyarakat Bintan dalam jangka panjang.

REFERENSI

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan 2021. (n.d.). Retrieved June 11, 2024, from https://dlh.bintankab.go.id/

Kurniawan, H. (2023). Mitigasi Penanggulangan Tumpahan Sludge Oil Di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *4*(1), 57–65. https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.540

Surati, P. B. (n.d.). *Kementerian LHK Minta Atasi Limbah Minyak Hitam | Harian Kepri*. Retrieved June 11, 2024, from https://www.hariankepri.com/pemkab-bintan-surati-kementerian-lhk-minta-atasi-limbah-minyak-hitam/